BAB I : P E N D A H U L U A N

Perjalanan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar di Indonesia, akhir-akhir ini semakin menarik perhatian banyak kalangan. Didirikan oleh para ulama terkemuka pada tahun 1926, NU telah beberapa kali mengalami perubahan bentuk. Bermula dari sebuah jamiyah diniyah (organisasi keagamaan) kemudian terjun ke gelanggang politik praktis, dan akhirnya sejak 1984 kembali ke khittah 1926, yaitu kembali menjadi jamiyah diniyah.

Perhatian para ilmuwan, politisi, sejarawan dan juga para wartawan kepada NU semakin besar, ketika NU menyatakan kembali ke bentuk aslinya, sebagai jam'iyah diniyah-sebagaimana yang diputuskan dalam muktamarnya di Situbondo akhir Desember 1984.

Sebagaimana organisasi yang lahir pada masa sebelum kemerdekaan, tentunya NU telah banyak mengalami perkembangan, mengikuti irama dan gerak bangsa Indonesia. Bahkan, NU juga aktif didalam usaha mengembangkan dan membangun bangsa Indonesia. Begitu juga setelah NU kembali ke khittahnya, tentu NU akan semakin memperluas bidang garapannya dalam bidang-bidang keagamaan, sosial, pendidikan, dakwah, kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya.

Perjalanan organisasi yang mempunyai anggota tersebar di seluruh pelosok tanah air ini, telah diwarnai oleh berbagai riak dan gelombang. Kalau pada mulanya berbentuk

jam'iyah diniyah yang bergerak dalam bidang-bidang keagamaan, maka pada saat berkecamuknya perang kemerdekaan, NU bergabung dengan partai Masyumi bersama-sama dengan beberapa organisasi Islam dan organisasi-organisasi nasional lainnya.

Setelah beberapa tahun menjadi pendukung utama Masyumi, akhirnya NU menyatakan keluar dari Masyumi dan berdiri sendiri sebagai partai politik. Setelah keluar dari Masyumi pada tahun 1952, maka pada pemilihan umum tahun 1955, NU mampu menempatkan diri sebagai partai besar diantara empat partai lainnya. Tapi, pada tahun 1971 lahirlah suatu kebijaksanaan dari pemerintah untuk menyederhanakan partai di Indonesia, dari sembilan menjadi (hanya) tiga partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (GOLKAR), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Karena adanya kebijaksanaan seperti itu, maka akhirnya NU tidak ada pilihan lain kecuali berfusi dengan PPP bersama tiga partai Islam lainnya.

Sekitar tiga belas tahun NU menjadi pendukung utama PPP, sampai akhirnya NU mengambil sikap tegas dalam muktamarnya ke-37 di Situbondo, untuk keluar dari PPP serta menjaga jarak yang sama dengan ketiga kekuatan sosial politik. Dalam muktamar itu, juga NU menyatakan kembali ke khittah 1926.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka skripsi ini diberi judul ''NAHDLATUL ULAMA SETELAH KEMBALI KE KHITTAH 1926''.

A. PENEGASAN DAN MAKSUD JUDUL

Sehubungan dengan judul tersebut di atas, kiranya perlu dijelaskan dan ditegaskan apa maksud dari judul itu.

Nahdlatul Ulama (selanjutnya disingkat NU), adalah organisasi keagamaan (jam'iyah diniyah) yang didirikan oleh para ulama terkemuka Indonesia pada tanggal 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 H, di kota Surabaya, Jawa Timur.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan, 'Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah dengan berpegang teguh pada salah satu dari empat madzhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali. Organisasi ini didirikan di Surabaya 31 Januari 1926 dalam rapat para Alim Ulama yang diselenggarakan untuk membentuk organisasi NU dan untuk mengirim utusan ke muktamar Islam di Mekah, dengan tugas memperjuangkan hukum-hukum ibadah dalam empat madzhab.'¹⁾

Yang dimaksud dengan utusan yang akan dikirim ke muktamar Islam itu, adalah apa yang disebut dengan 'Komite Hijaz'. Komite ini adalah utusan yang akan dikirim untuk menyampaikan pesan kepada Raja Abdul Aziz Ibnu Saud, penguasa baru Hijaz, Arab Saudi pada waktu itu. Komite Hijaz beranggotakan; H. Hasan Gipo (ketua), H. Shaleh Syamil (wakil ketua), Mohammad Shadiq (sekretaris), dan dibantu seorang anggota Abdul Halim.²⁾

Jadi yang dimaksud Nahdlatul Ulama dalam judul skripsi ini, adalah jam'iyah diniyah yang didirikan oleh para ulama

- 1). Ensiklopedia Indonesia, bagian 4, Penerbit Buku Ichtiar Baru - Van Hoeve, Jakarta 1983, hal. 2327
- 2). Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatu Ulama, Penerbit Jatayu, Solo 1985, hal 1-2

pada tanggal 31 Januari 1926, yang bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 H, di Surabaya, Jawa Timur. Sedangkan pendiri NU antara lain KH. Hasyim Asy'ari, KH. Abdul Wahab Chasbullah, KH. Bisri Syamsuri, dan lain-lain.

Sebagaimana diketahui, bahwa sejak didirikan pada tahun 1926, NU telah beberapa kali mengalami perubahan bentuk organisasi dan tujuan serta medan perjuangannya. NU pernah menjadi pendukung utama partai Islam masyumi hingga menyatakan keluar pada tahun 1952, kemudian NU berdiri sendiri sebagai partai politik, dan akhirnya harus berfusi dengan PPP pada tahun 1973. Pada kurun waktu itu, stressing perjuangan NU adalah dalam bidang politik.

Pada muktamarnya yang ke-27 di Situbondo Desember 1984 yang lalu, NU mengkaji ulang terhadap perjalanannya selama bergelut dengan dunia politik. Akhirnya, melalui suatu keputusan yang bulat, NU menyatakan kembali ke khittah 1926, yang berarti pula NU meninggalkan gelanggang politik praktis yang selama ini ditekuninya.

Pemulihan khittah NU 1926 ini, seperti yang tertuang dalam keputusan muktamar NU, 'adalah kembali kepada semangat yang dilandasi oleh kekuatan yang mendorong didirikannya NU pada tahun 1926, dan tujuan yang hendak dicapainya dengan menyadari sepenuhnya terhadap setiap perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan masyarakat dimana NU melakukan khidmahnya (darma bhaktinya).³⁾

3). Dikutip dari buku Keputusan Muktamar NU XXVII, PWNU Jatim, 1985, hal 23

Jadi, yang dimaksud dengan kembali ke khittah 1926, adalah kembali kepada semangat yang melatarbelakangi berdirinya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926, 60 tahun yang lalu. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai NU dengan kembali ke khittah 1926 ini, juga disebutkan dalam keputusan NU 1984, seperti yang tercantum dalam 'Statuten Perkoempoelan Nadhatoel Oelama'.

Statuten NU tahun 1926 pasal 3 itu berbunyi : Mengadakan perhoeboengan diantara 'oelama-'oelama jang bermadzhab ; memeriksa kitab-kitab sebeloenja dipakai oentoe mengadjar seopaja diketahoei apakah itoe dari kitab-kitab Ahlissunnah Wal Djama'ah ataoe kitab-kitab Ahli Bid'ah; menjiarkan agama islam berasaskan pada madzhab empat dengan djalan apa sadja jang halal; berichtiar memperbanjak madrasah-madrasah jang berasaskan agama islam; memperhatikan hal-hal jang berhoeboengan dengan masdjid-masdjid, soeraoe-soeraoe dan pondok-pondok, begitoe djoega dengan hal ihwalnja anak-anak jatim dan orang-orang fakir miskin serta mendirikan badan-badan oentoe memadjoekan oeroesan pertanian, perniagaan jang tiada dilarang sjara' agama islam. 4)

Dalam statuten itu, jelas sama sekali tidak disinggung soal politik yang akan dijadikan alat perjuangan NU dan untuk diperjuangkan NU. Menurut statuten itu, NU akan bergerak dan berjuang dalam bidang-bidang keagamaan melalui sarana pendidikan, madrasah, masjid, dan surau-surau. Selain itu, NU berusaha untuk mengembangkan ajaran islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah dengan tetap mempertahankan madzhab. Disamping itu, juga bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan untuk membantu anak-anak yatim dan fakir miskin.

Tujuan didirikannya NU pada tahun 1926 itu, juga

4). Ibid, hal 22

ditegaskan dalam buku 'Khittah Nahdlatol Ulama' yang diterbitkan oleh PBNU. Didirikannya Nahdlatul Ulama, mempunyai tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah, serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia. 5)

Konsekuensi logis dari pemulihan khittah NU 1926 ini, selain NU harus melepaskan diri dari kegiatan politik praktis, berarti pula NU akan menempatkan ulamanya dalam jajaran tertinggi dalam kepemimpinan organisasi. Sebab, NU memang didirikan oleh para ulama, yang waktu itu dijadikan sebagai sarana untuk membangkitkan para ulama dan para pengikutnya dalam kegiatan keagamaan.

Dalam keputusan muktamar juga ditegaskan, bahwa syuriah adalah lembaga formal NU yang mencerminkan kepemimpinan ulama dalam jam'iyah NU. Syuriah adalah pengendali, pimpinan dan pengelolah NU. Sedangkan pengurus Tanfidziyah (pelaksana) sebelum dipilih oleh musyawarah Tanfidziyah, terlebih dahulu harus dimintakan persetujuan dari Syuriah. Bahkan, Syuriah juga diperbolehkan memberhentikan pengurus Tanfidziyah yang melakukan

5). Lajnah Ta'alif Wan Nasr PBNU, Khittah Nahdlatul Ulama, hal. 4

pelanggaran. 6)

Sekarang, setelah NU kembali ke khittah 1926, berarti akan timbul permasalahan baru. Kalau selama ini NU sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan politik praktis, tetapi setelah kembali ke khittah, berarti kegiatan-kegiatan semacam itu harus ditiggalkan. Bagaimana sikap dan tindakan yang akan dan sudah diambil oleh pimpinan NU sehubungan dengan keputusan kembali ke khittah 1926 itu. Begitu juga dengan kegiatan yang dikerjakan oleh NU, tentu akan disesuaikan dengan khittahnya, yaitu menitikberatkan kepada kegiatan-kegiatan di bidang diniyah (keagamaan) dan sosial kemasyarakatan.

Dengan demikian, maka jelaslah pula bahwa titik berat pembahasan dalam skripsi ini nanti, adalah apa dan bagaimana Nahdlatul Ulama setelah menyatakan kembali ke khittah 1926.

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk memilih judul tersebut, antara lain :

1. Adanya keputusan NU dalam muktamar ke-27 di Situbondo akhir tahun 1984, bahwa NU menyatakan kembali ke khittah 1926. Dalam arti, NU kembali ke semangat yang menjadi latarbelakang didirikannya NU pada tahun 1926.
2. Adanya keputusan muktamar yang menyatakan Nahdlatul Ulama keluar dari Partai Persatuan Pembangunan, yang selama

6). Keputusan Muktamar NU XXVII, Op. Cit. hal. 25

ini didukung sepenuhnya oleh NU. Selain itu, NU juga menyatakan akan menjaga jarak yang sama dengan ketiga kekuatan sosial politik peserta pemilihan umum.

3. Setelah kembali ke khittah 1926, bidang-bidang apa saja yang akan digarap oleh NU. Sebab, selama ini tokoh dan pengurus NU dikenal sangat aktif dalam kegiatan politik praktis, sehingga setelah NU tidak lagi berpolitik praktis, tentu akan ada penyaluran pada kegiatan-kegiatan lain.
4. Adanya sebuah anggapan dari Prof. Anderson (seperti yang dikutip oleh Dr. Zamakhsyari Dzifir dalam bukunya Tradisi Pesanteren), bahwa sekarang ini sangat sedikit kaum akademisi yang mengetahui NU, belum ada disertasi yang ditulis mengenai NU, dan adanya keraguan Anderson tentang apakah akan ada seorang doktor yang akan menulis disertasi tentang NU. Padahal, NU merupakan salah satu kekuatan sosial, kultural, keagamaan dan politik yang cukup berpengaruh di Indonesia selama puluhan tahun.
5. Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang berskala nasional dan mempunyai anggota tersebar di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Oleh karena itu, adalah sangat pantas kalau organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini diangkat dalam suatu skripsi, yang nantinya bisa disumbangkan bagi kehidupan keagamaan, khususnya bagi jam'iyah NU sendiri.

C. RUMUSAN MASALAH

Adapun masalah-masalah yang dapat dirumuskan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apa dan bagaimana latar belakang didirikannya Nahdlatul Ulama, serta siapa yang mendirikan pada waktu itu?
2. Pada awal berdirinya, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan yang lingkup kegiatannya juga berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Tapi organisasi ini kemudian tertarik untuk aktif dalam kegiatan politik praktis. Faktor apa yang mendorong sehingga NU melibatkan diri dalam aktivitas politik praktis? Misalnya ketika NU bergabung dengan Masyumi, kemudian menjadi Partai Nahdlatul Ulama, dan terakhir NU menjadi salah satu pendukung utama Partai Persatuan Pembangunan. Tapi kemudian NU malah menyatakan keluar dari partai itu. Hal-hal apa saja yang mendorong NU untuk keluar dari PPP?
3. Keadaan dan kondisi serta apa dan bagaimana kehidupan Nahdlatul Ulama setelah kembali ke khittah 1926, beserta latar belakang kenapa NU kembali menjadi jamiyah diniyah? Kembalinya NU pada semangat 1926 itu, mengharuskan NU untuk mengadakan penyesuaian diberbagai bidang dan harus mengadakan konsolidasi organisasi serta mengadakan perubahan orientasi dan program. Bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang diambil NU setelah menjadi jamiyah diniyah? Termasuk juga hubungannya dengan partai politik dan sebagainya.

D. HIPOTESIS

Berpijak dari permasalahan tersebut, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Sebelum Nahdlatul Ulama didirikan oleh para ulama pada tahun 1926 di kota Surabaya, telah terjadi beberapa momentum penting yang bisa dijadikan sebagai motivasi untuk mendirikan jam'iyah NU. Selain adanya kongres kilafat atau muktamar Islam di Saudi Arabia yang akhirnya mendorong para ulama untuk mengadakan rapat untuk membentuk utusan, juga adanya maksud untuk melestarikan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah dan keinginan untuk menghimpun perjuangan para ulama dalam satu wadah, merupakan motivasi penting untuk mendirikan jam'iyah Nahdlatul Ulama.
2. Sejak didirikan pada tahun 1926 sampai saat menjelang pelaksanaan muktamar NU ke-27 di Situbondo akhir 1984, NU telah beberapa kali mengalami perubahan bentuk dan orientasi organisasi. Pada saat didirikan, NU adalah jam'iyah diniyah yang bergerak dalam bidang keagamaan dan sosial. Namun setelah itu, NU terjun ke gelanggang politik dengan menggabungkan diri kedalam partai Masyumi. Karena mersa kurang puas terhadap perlakuan pimpinan Masyumi dan adanya keinginan untuk hidup sendiri, maka NU memutuskan untuk menjadi partai politik yang bebas dan berdiri sendiri. Pada tahun 1973, ketika pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk menyederhanakan jumlah

partai di Indonesia, akhirnya NU berfusi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sesudah bergelut dengan dunia politik praktis selama sekitar 40-an tahun, akhirnya NU memutuskan untuk kembali ke khittah 1926 melalui muktamarnya di Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asembagus Situbondo.

3. Setelah muktamar Situbondo usai dan berhasil mengambil beberapa keputusan yang fundamental, --seperti kembali ke khittah 1926, keluar dari PPP dan menjaga jarak yang sama dengan ketiga kekuatan sosial politik--, akhirnya mau tidak mau PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) harus membuat semacam petunjuk pelaksanaan dan surat-surat keputusan sebagai tindak lanjut dari keputusan muktamar. Misalnya tentang hubungan NU dengan tiga partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum, NU mengambil sikap untuk menjaga jarak yang sama, ya tidak ikut PPP, juga tidak bergabung dengan Golkar, dan tidak pula merangkul PDI. PBNU memberikan kebebasan kepada anggotanya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada partai politik yang dikehendaki dan sesuai dengan keinginannya, serta harus dilandasi dengan akhlaqul karimah.

PBNU juga mengeluarkan surat keputusan beserta petunjuk pelaksanaannya untuk melarang perangkapan jabatan bagi pengurus harian NU dengan pengurus partai politik. SK itu dimaksudkan untuk mengamankan keputusan muktamar, dan sekaligus sebagai langkah untuk menjaga jarak yang sama dengan ketiga kekuatan sosial politik. Namun di balik itu

PBNU tetap menginstruksikan kepada seluruh warga NU, agar tetap menyukseskan pelaksanaan pemilihan umum 1987. Sekarang, setelah NU tidak berpolitik praktis lagi, tentu akan timbul beberapa permasalahan terutama yang berkaitan dengan kebiasaan yang selama ini terjadi dalam tubuh NU, yaitu dalam hal aktifitas politik praktis. Oleh sebab itu PBNU bersama dengan seluruh jajaran organisasinya di Indonesia, terus berusaha untuk mengalihkan kegiatan-kegiatan jam'iyah NU ke dalam bidang-bidang keagamaan dan sosial. Bahkan, beberapa bidang garapan NU yang selama ini terbengkalai karena aktifitas politik itu, juga sedang dan akan ditangani secara serius. Kegiatan-kegiatan yang diprogramkan itu meliputi bidang-bidang dakwah, pendidikan termasuk pesantren, mubarrot dan sosial, bidang umum yang meliputi hukum, pengkaderan, pembinaan keluarga sehat dan sejahtera, penggalakan hidup mandiri atau wiraswasta, dan lain sebagainya.

E. METODE PENULISAN

1. Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini, terlebih dahulu akan dimulai dengan mengumpulkan data dan materi. Adapun data-data dan materi yang akan ditulis dalam skripsi ini diperoleh dan dikumpulkan dari :

- a. Sumber Tertulis, yaitu data atau materi yang diperoleh dari buku-buku yang ditulis oleh para cendekiawan dan para sejarawan, atau yang

diperoleh dari dokumen-dokumen NU, naskah-naskah keputusan, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga NU, surat kabar, majalah dan lain sebagainya.

- b. Sumber lisan, yaitu diperoleh dari hasil wawancara dengan para ahli, tokoh dan pimpinan NU, dan orang-orang yang dianggap perlu atau berkompeten dengan permasalahan.
- c. Penelitian lapangan dan pengamatan langsung terhadap kegiatan-kegiatan jam'iyah NU, seperti muktamar, rapat-rapat, dan kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh NU.

2. Pengolahan Data

Untuk mengolah dan menganalisa data-data dan materi yang dikumpulkan, maka metode yang akan dipergunakan adalah :

- a. Metode Analisis, yaitu dengan meneliti dan menganalisa data dan materi yang terkumpul untuk kemudian diambil kesimpulan.
- b. Metode Kompilatif, yaitu dengan mengolah data dan materi yang telah dikumpulkan sesuai dengan apa adanya, kemudian disajikan dengan tidak mengurangi atau menambah sedikitpun. Jadi, penyajian data dalam bentuk ini bersifat diskriptif inventaristis.
- c. Metode Komparatif, yaitu dengan melakukan perbandingan dari berbagai macam data yang telah dikumpulkan, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

3. Penyajian Data

Setelah data-data dan materi yang dikumpulkan itu diolah, maka akan disusun dalam dua bentuk :

- a. Diskriptif, yaitu penyajian data dengan segala dimensi ruang dan waktu. ⁷⁾ Jadi penyajian data ini bersifat inventaristis.
- b. Analitis, yaitu dengan menguraikannya dan dihubungkan dengan faktor kondisional dan diterminal dari dari peristiwa itu. ⁸⁾

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama : Pendahuluan

Dalam bab pertama ini, akan dibahas penegasan dan maksud judul, alasan pemilihan judul, lingkup pembahasan, dan rumusan masalah beserta hipotesis nya. Kemudian dijelaskan metode penulisan skripsi yang mencakup pengumpulan data, pengolahan data dan penyajian data, serta sistematika penulisan skripsi sebagai pasal terakhir dalam bab ini.

Bab Kedua : Bab ini akan membahas sekitar kelahiran Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 dengan latar

7). A. Sartono Kartodirdjo, Lembaran Sejarah No. 6 Tahun 1970, Seksi Penelitian Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM, hal. 4

8). Ibid.

belakang dan motivasinya, serta para pendirinya.

Bab Ketiga : Bab ini akan dibahas masalah kegiatan Nahdlatul Ulama dalam politik praktis, yaitu ketika NU menjadi pendukung utama partai Masyumi, kemudian menjadi partai politik dan ketika NU berfusi dengan Partai Persatuan Pembangunan.

Bab Keempat : Pembahasan dalam bab ini, dimulai dengan kembalinya Nahdlatul Ulama ke khittah 1926 dengan disertai pula sebab-sebab yang melatarbelakanginya, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam organisasi itu sendiri.

Kemudian pembahasan akan diteruskan kepada masalah NU kembali menjadi jam'iyah diniyah dan sikap NU mempertegas khittah 1926, dengan dilengkapi usaha-usaha NU untuk mengadakan perubahan orientasi dan program, di samping usaha-usaha penataan organisasi NU setelah kembali menjadi organisasi keagamaan.

Pembahasan selanjutnya pada bab ini adalah langkah langkah yang diambil NU setelah memutuskan kembali menjadi jam'iyah diniyah, yaitu keluar dari PPP dan kemudian menjaga jarak yang sama dengan ketiga kekuatan sosial politik, dan larangan perangkapan jabatan

bagi pengurus harian NU dengan organisasi sosial politik. Sesudah itu pembahasan akan dilanjutkan dengan sikap tegas NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi serta usaha-usaha NU untuk memasyarakatkan khittah dan ke-NU-an.

Bab Kelima : Pada bab terakhir ini, akan diketengahkan kesimpulan dari skripsi ini, dan juga saran-saran, kata penutup, daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran.